

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGURANGI ANGKA
KEMISKINAN**

(Studi Di Dinas Sosial Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

ADMINISTRASI PUBLIK



Oleh :

FIRMINA ADVENIA

2019210070

**KOMPETENSI MANAJEMEN PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi**

MALANG

2023

RINGKASAN

Tujuan dari penulisan esai Skripsi ini adalah untuk menjelaskan secara rinci inisiatif yang dilakukan pemerintah daerah dalam memerangi kemiskinan di kota Batu melalui Dinas Sosial. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dan peneliti menggunakan purposive sampling untuk memilih informan. Wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan sebagai strategi pengumpulan data, sedangkan metode analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian mengenai inisiatif pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Batu cukup mengesankan. Didasarkan pada beberapa faktor antara lain pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), pemberian pelatihan ketenagakerjaan kepada masyarakat melalui pengawasan dan pemberian asesmen terkait kegiatan tersebut, serta sebagai dukungan yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam. APBN untuk Covid-19, APBD untuk inflasi, BANK JATIM, dan untuk inflasi serta kerja sama dengan desa atau kelurahan untuk membantu penyaluran bantuan ini menjadi faktor pendukungnya. Selain itu, setiap desa atau kelurahan memiliki dua puluh pekerja sosial untuk mendukung distribusi bimbingan ini. Perspektif masyarakat dan kurangnya informasi mengenai perlunya mendukung program pemerintah menjadi kendala.

KATA KUNCI : Kemiskinan, Upaya pemerintah Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah sosio-ekonomi yang terus-menerus terjadi di masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang adalah kemiskinan. Salah satu dampak buruk laju pertumbuhan penduduk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat adalah kemiskinan. Setelah Jawa Barat, Jawa Timur merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi kedua. Setiap tahunnya, pemerintah berupaya mengentaskan kemiskinan. Tujuan pengentasan kemiskinan tidak sesuai harapan karena sasaran yang tidak tepat (Almira dan Vita, 2016: 5).

Menurut data Badan Pusat Statistik, terdapat 27,55 juta lebih penduduk miskin di Indonesia per September 2020. Jumlah ini bertambah 1,13 juta orang dibandingkan bulan Maret 2020 dan 2,76 juta lebih banyak dibandingkan bulan September 2019. Yang pasti, pandemi Covid-19 yang sudah sampai ke Indonesia menjadi biang keladinya. Dampaknya, angka kemiskinan di Indonesia semakin meningkat. Karena kerugian bisnis yang disebabkan oleh wabah Covid-19, terjadilah kemiskinan di daerah ini. Akibatnya, dunia usaha terpaksa memecat mereka. Hal ini menyebabkan jumlah pengangguran meningkat. Akibatnya semakin banyak pengangguran sehingga meningkatkan angka kemiskinan pekerja (Wibisono et al., 2022: 35).

Dampak parah pandemi Covid-19 terhadap kemiskinan juga berdampak buruk pada bisnis pariwisata Kota Batu. Dampak paling parah terhadap industri pariwisata terjadi di Kota Batu sendiri. Dampak pandemi Covid-19 menunjukkan betapa

sensitifnya industri pariwisata terhadap bencana alam seperti wabah penyakit dan pandemi. Pariwisata berkaitan dengan banyak industri pendukung. Padahal pemerintah dan masyarakat di Kota Batu bergantung pada perekonomian dalam industri pariwisatanya (Rizki, Adam, 2022: 6).

Pada tahun 2020 terdapat 8.012 orang yang tergolong miskin. Pada tahun 2022, akan terdapat 51 orang lagi di Kota Batu yang tergolong miskin. Jumlahnya bertambah 51 sehingga totalnya menjadi 8.063. Menurut Adiek Imam Santoso, Sekretaris Dinas Sosial Kota Batu, pandemi Covid-19 yang masih terjadi masih menjadi penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Kota Batu. Meski perlahan membaik, namun hal ini tidak menjamin mereka yang kehilangan pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan baru (Indo, Beni, 2022).

Namun, alih-alih hanya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, pemerintah harus berupaya mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan dan inisiatif pengentasan kemiskinan dan harus dilihat lebih sebagai subyek dibandingkan objek. Untuk memastikan metode dan teknik penanggulangan kemiskinan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, maka pemerintah tidak boleh memimpin perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanggulangan kemiskinan. Sebaliknya, lembaga ini seharusnya hanya berperan sebagai fasilitator. Inisiatif pengentasan kemiskinan yang tidak efektif dilaksanakan akibat kesalahan teknik pengentasan kemiskinan (Huraerah, Abu, 2013: 3).

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa berdirinya Negara Kesatuan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur merupakan tujuan kemerdekaan Indonesia (Ayat 2 Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Pemerintahan Republik Indonesia didirikan antara lain untuk menjaga keutuhan negara dan seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan sosial, dan meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia. “Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya,” bunyi Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945. Sedangkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945, “Orang miskin dan anak terlantar diurus oleh negara” (Utami, N.S, 2022).

Karena ada permasalahan di sana yang ingin saya teliti, maka peneliti tertarik untuk mengkaji kemiskinan di Kota Batu. Hal ini sejalan dengan temuan awal dan perbincangan singkat dengan Ibu Yeanny, salah satu staf Bidang Pelayanan Kemiskinan di Dinas Sosial Kota Batu, yang menyatakan bahwa angka kemiskinan di Kota Batu masih terus meningkat akibat pandemi Covid-19. -19 pandemi. setiap tahun, khususnya selama COVID-19. Karena nama penerima bantuan masih tercantum dalam data meski penerima sudah meninggal dunia, penyaluran bantuan agak terhambat di tengah keterpurukan ekonomi akibat Covid-19 dan pelayanan masyarakat. Dan permasalahan ini masih hangat diperbincangkan bahkan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Dinas Sosial Kota Batu dipilih sebagai tempat kajian oleh peneliti karena dalam topik ini mempunyai peranan yang cukup besar sebagai pemberi bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Melihat

permasalahan di atas, maka saya terdorong untuk mengubah topik penelitian menjadi **“Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengurangi Kemiskinan di Kota Batu”** dengan harapan peneliti dapat mempelajari bagaimana upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Batu.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya maka rumusan masalah peneliti adalah sebagai berikut:

1. Langkah apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Batu?
2. Faktor apa saja yang membantu dan menghambat upaya pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan

1. untuk mengetahui inisiatif yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Batu.
2. Untuk mengetahui apa saja yang mendukung dan menghambat upaya pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan perkotaan

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Proyek penelitian di masa depan dapat memperoleh manfaat dari teori dan analisis yang mungkin dikembangkan sebagai hasil penelitian ini.

2. Manfaat Akademis

1) Bagi Peneliti

Temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan penelitian dan membantu mahasiswa administrasi publik bersiap memasuki dunia kerja.

2) Bagi Dinas Sosial

sebagai kontribusi dan faktor dalam penyelenggaraan pelayanan untuk memerangi kemiskinan

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Adam Rizki, 2022. *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Sektor Pariwisata di Kota Batu. Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 6(3), 503~512.
(<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/22266>, diakses pada 29 Januari 2023).
- Huraerah Abu , 2013. *Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Volume.12, No.1.
(https://dlwqtxts1xzle7.cloudfront.net/56703004/_p-libre.pdf?, diakses pada 30 Januari 2023).
- Qurratu'ain Q. Almira & Ratnasari Vita, 2016. *Analisis Indikator Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Menggunakan Regresi Panel. JURNAL SAINS DAN SENI ITS*, 5(2), 2337-3520.
(http://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/16582, diakses pada 18 Desember 2022).
- Wibisono R, DKK, 2022. *Analisis Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Resiko Peningkatan Kemiskinan Di Indonesia*. Volume 3, No 1 Volume 3, No I.
(<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/salam/article/view/12271> diakses pada 18 Desember 2022).

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Pasal 34 Tentang Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar dipelihara Oleh Negara

Internet :

- Indo, Beni. 2022. *Jumlah penduduk miskin kota batu makin bertambah imbas pandemi belum berakhir* (<https://jatim.tribunnews.com/2022/10/11/jumlah-warga-miskin-kota-batu-makin-bertambah-imbas-pandemi-belum-berakhir-ini-Kata-Dinsos>, diakses pada Januari 2023).
- Utami, N.S. 2022. *Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia sesuai UUD 1945* (<https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/10/123000269/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia-sesuai-uud-1945#>, diakses pada 29 Januari 2023).